BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses pensertifikatan tanah pusako tinggi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pariaman mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010. Proses ini mencakup tahapan persiapan dokumen, pendaftaran ke BPN, pemeriksaan serta pengukuran tanah, pengumuman selama 60 hari, hingga penerbitan sertifikat. Tanah pusako tinggi dapat disertifikatkan dalam bentuk sertifikat komunal atau individual, tergantung pada status kepemilikannya. Meskipun waktu penyelesaian idealnya sekitar 3 bulan, faktor administratif dan kondisi di lapangan dapat mempengaruhi durasi proses. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan kepastian hukum atas tanah pusako tinggi dapat lebih terjamin bagi masyarakat adat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mensertifikatkan tanah pusako tinggi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum dan administrasi menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam proses pendaftaran. Kedua, kendala dalam pembuatan dan pengesahan ranji, terutama ketidaksesuaian data, memperlambat proses sertifikasi. Ketiga, kurangnya musyawarah antar kaum mengakibatkan ketidaksepakatan terkait batas tanah dan hak waris, yang menghambat pengambilan keputusan. Terakhir, biaya pengurusan pensertifikatan

menjadi beban bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

3. Upaya masyarakat dalam mengatasi kendala pensertifikatan tanah pusako tinggi meliputi peningkatan pemahaman prosedur hukum melalui pendampingan Badan Pertanahan Nasional Pariama, memastikan keakuratan data ranji, mengedepankan musyawarah dengan bantuan tokoh adat, serta mengatasi kendala biaya melalui penggalangan dana bersama dan program subsidi pemerintah berupa bantuan finansial untuk pengurusan sertifikat tanah dengan PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Langkah-langkah ini bertujuan mempercepat proses sertifikasi dan memberikan kepastian hukum

B. Saran

1. Untuk memperlancar proses pensertifikatan tanah pusako tinggi, masyarakat sebaiknya memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen sejak awal guna menghindari kendala administratif. Selama tahap pemeriksaan dan pengukuran, koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta tokoh adat perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait batas tanah. Pada masa pengumuman 60 hari sebelum sertifikat diterbitkan, masyarakat diharapkan aktif memantau serta menanggapi potensi keberatan atau sengketa yang muncul
2. Masyarakat perlu berhati-hati dalam proses pensertifikatan tanah pusako tinggi agar tidak menghadapi kendala yang dapat memperlambat atau menggagalkan sertifikasi. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur

hukum dan administrasi dapat menyebabkan kesalahan yang berakibat pada sengketa atau keterlambatan proses

3. Masyarakat sebaiknya meningkatkan pemahaman terhadap prosedur hukum pendaftaran tanah dengan mencari bimbingan dari pihak berwenang, termasuk Badan Pertanahan Nasional Pariaman. Untuk memastikan keakuratan data ranji, verifikasi sejak awal sangat penting guna mencegah potensi permasalahan di kemudian hari. Musyawarah dengan melibatkan tokoh adat perlu dijaga agar setiap keputusan dapat diterima oleh semua pihak secara adil. Selain itu, dalam menghadapi kendala biaya, masyarakat dapat lebih aktif menggalang dana bersama serta mencari informasi mengenai bantuan finansial yang tersedia agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih lancar.